

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini kinerja Instansi Pemerintah mulai menarik perhatian publik. Transparansi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa memberikan kepercayaan lebih dari masyarakat kepada pemerintah dan menjadi nilai tambah bagi peningkatan kemakmuran masyarakat kedepannya. Dalam era reformasi saat ini masyarakat mulai kritis terhadap pemerintah, namun banyak keinginan dan tuntutan masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena buruknya kinerja dari instansi pemerintahan tersebut. Buruknya kinerja instansi pemerintah dapat kita lihat dari banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN.

Di Indonesia, Korupsi dan nepotisme menjadi masalah yang sangat serius dan harus sangat diperhatikan. Korupsi dan nepotisme juga menjadi perbuatan merugikan yang banyak dilakukan oleh para oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Korupsi termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang dari beberapa oknum untuk menggelapkan uang negara dan memberikan kerugian untuk negara. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu saja hal-hal tersebut dapat menghambat kinerja positif dari suatu instansi pemerintah.

Pemerintah diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara baik, efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, peran audit kinerja di pemerintahan merupakan kebutuhan yang mutlak untuk segera diterapkan pada masa sekarang maupun di masa masa yang akan datang (pedoman audit kinerja atas instansi pemerintahan, 2016)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 50 ayat (2), audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan

fungsi intansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit efektivitas, serta ketaan peraturan.

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan secara yang belum objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja instansi/entitas yang mencakup ekonomis, efisiensi, dan efektifitas program atau kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan Kinerja bertujuan memberikan simpulan atas pencapaian program atau kegiatan instansi/entitas dari segi ekonomis, efisien dan efektifitas serta rekomendasi atas perbaikan yang harus dilakukan oleh instansi/entitas yang bersangkutan. (Baharuddin Aritonang, 2016).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah dengan dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas yang independent. Menurut UU 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan yang disingkat BPK, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK ialah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga pemerintah yang melimpahkan pengendalian dan tanggung jawab atas keuangan pemerintah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, dan pelayanan publik serta menjalankan fungsinya secara mandiri dan otonom. Instansi pemerintah, instansi pemerintah, perusahaan daerah, dan instansi atau badan lain yang mengelola keuangan pemerintah.

Pemerintah memberikan tugas kepada BPK untuk melakukan audit kinerja terhadap instansi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dan berupaya memberikan pengetahuan yang baru supaya bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Objek audit kinerja dapat meliputi program pemerintah, aktivitas pelayanan yang dilakukan suatu entitas serta kebijakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Prosedur sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu kegiatan. Dengan adanya prosedur dapat memberikan arahan dan pemahaman yang sama kepada semua orang yang bergerak dalam organisasi tertentu. Dalam melaksanakan audit kinerja juga dibutuhkan prosedur agar bisa digunakan sebagai pedoman dan membantu memudahkan kerja auditor atau pemeriksa supaya bisa terhindar dari kesalahan pelaksanaan. Dalam melaksanakan audit kinerja kendala yang sering ditemui oleh pemeriksa adalah penentuan kriteria pemeriksaan yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan ini bisa disebut juga dengan tolak ukur yang digunakan untuk menilai objek pemeriksaan sesuai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan yang peranannya bersifat independen dan profesional untuk melakukan audit terhadap instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dan melaporkan kepada pemerintah. Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan audit kinerja terhadap instansi pemerintah pada kantor BPK dan mengambil judul “PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT KINERJA TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA BARAT”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas adalah bagaimana langkah-langkah pelaksanaan audit kinerja pada instansi pemerintahan, dan penerapan prosedur pelaksanaan audit kinerja di Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Sumatera Barat

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana Prosedur pelaksanaan Audit kinerja yang benar terhadap Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman prosedur pelaksanaan audit kinerja pada instansi BPK Perwakilan Sumatera Barat. Sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tugas akhir.

b. Bagi perguruan tinggi

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di bidang ilmu keuangan negara dan daerah pada umumnya dan bidang ilmu audit pada khususnya

c. Bagi kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat

Penulisan tugas akhir dari kegiatan magang yang dilakukan di kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan peran BPK dalam menyempurnakan dan mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan kegiatan pengawasan dan audit kinerja.

1.5. Metode Pengambilan Data

1.5.1. Studi Keperpustakaan

Yaitu mencari, mempelajari, memahami bahan bacaan yang mencakup materi kuliah tentang masalah yang di ambil oleh penulis.

1.5.2. Studi Lapangan

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari karyawan dan pejabat bersangkutan yang berwenang.

b. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

1.5.3. Pencarian Melalui Internet

Melakukan pencarian data pada internet melalui website yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

1.6. Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang penulis memilih tempat magang di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat. Kegiatan magang dilakukan selama 40 hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode magang,, metode analisa dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai pengertian prosedur, pelaksanaan, audit, kinerja, audit kinerja, tujuan audit kinerja, ,manfaat audit kinerja, prosedur pelaksanaan audit kinerja.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Membahas tentang sejarah umum, Visi dan Misi, Tugas dan Wewenang, Struktur Organisasi, Deskripsi BPK Perwakilan Sumatera Barat

BAB IV : PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut prosedur pelaksanaan audit kinerja terhadap instansi pemerintah pada kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan laporan magang serta saran yang bersifat membangun.